

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA  
PERIMBANGAN, DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)  
TERHADAP BELANJA MODAL  
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi  
Jawa Tengah Tahun 2014-2016)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Disusun Oleh :**

**LHAURA ANDIKA NGESTININGSIH**

**B200150363**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA  
PERIMBANGAN, DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN  
(SiLPA) TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Empiris Pada Pemerintah  
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016)”.**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Yang ditulis oleh :

**LHAURA ANDIKA NGESTININGSIH**

**B200150363**

Telah diperiksa di disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



**Drs. Eko Sugiyanto, M.Si**

**NIDN. 0628055901**

## HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA  
PERIMBANGAN, DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN  
(SiLPA) TERHADAP BELANJA MODAL  
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi  
Jawa Tengah Tahun 2014-2016)**

Yang dituliseleh :

**LHAURA ANDIKA NGESTININGSIH**


**B200150363**

Telah dipertahankan di Depan Penguji  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada Hari Jum'at, 23 Agustus 2019  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

DewanPenguji

1. Drs. Eko Sugiyanto, M.Si  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dra. RinaTrisnawati, M.Si.,Akt.,Ph.D. CA ( )  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Drs. Suyatmin, M.Si  
(Anggota II Dewan Penguji)

()  
()  
()

Dekan,  
  
**Dr. Syamsudin, M.M**  
**NIDN 0017025701**



## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 23 Agustus 2019  
Penulis



**LHAURA ANDIKA NGESTININGSIH**  
**B200150363**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA  
PERIMBANGAN, DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)  
TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Empiris Pada Pemerintah  
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016)**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap belanja modal pada provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang meliputi 35 Kabupaten/Kota. Sampel dari penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang melaporkan secara rutin Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dari tahun anggaran 2014 hingga 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh tidak signifikan Terhadap Belanja Modal.

**Kata Kunci :** Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Belanja Modal

**Abstract**

This study aims to examine the effect of the Regional Revenue, the Balancing Fund consisting of the General Allocation Fund and the Special Allocation Fund, and the Remaining Budget Financing on capital expenditure in Central Java Province. The research method used is quantitative research methods. The population of this research is all regencies / cities in Central Java Province which cover 35 regencies / cities. The sample of this research is all regencies / cities in Central Java Province who routinely report the Regional Budget. The data used comes from the financial statements of the Regency / City of Central Java Province from the 2014 fiscal year to 2016. The results showed that the Regional Original Revenue, Revenue Sharing Funds, Special Allocation Funds had an influence on Capital Expenditures while the General Allocation Funds and the Remaining Budget Financing had no significant effect on Capital Expenditures.

**Keywords:** Regional Original Revenue, Balance Funds, Remaining Budget Financing and Capital Expenditures

## **1. PENDAHULUAN**

Berdasarkan undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan penyelenggara urusan pemerintah oleh pemda dan DPRD menurut asas otonomi. Pelaksanaan daerah pada dasarnya merupakan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara

melaksanakan pembangunan daerah sesuai kehendak dan kepentingan masyarakat serta mengembangkan daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya sesuai dengan perundang-undangan yang menjadi hak dan wewenang pemda dalam mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya.

Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewenangan untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah Janah et al (2017). UU tersebut menegaskan bahwa setiap daerah diberikan kebebasan dalam menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, menata dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan daerahnya dengan bantuan dari pemerintah, disamping itu pemerintah daerah juga diberi keluasaan dalam menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah Janah et al (2017).

Penyerahan berbagai kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah diikuti dengan pengalihan masalah pembiayaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, salah satu asal pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut Daerah di dasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) didefinisikan sebagai sumber pendapatan yang diperoleh dari pendapatan APBN yang dianggarkan untuk pemerataan alokasi keuangan antar daerah dalam pendanaan kelengkapan rumah tangga daerahnya.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN (Janah, dkk 2017). Daerah tertentu adalah daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahun untuk mendapatkan alokasi DAK.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD merupakan salah satu parameter kinerja organisasi pemerintah daerah yang mendapat perhatian utama dari para pemangku kepentingan Mardiasmo, (2002) (Devvas dikutip dari Sari dkk, 2017) menjelaskan bahwa informasi SiLPA APBD yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran

(LRA) merupakan salah satu indikator bagi rekanan pemerintah daerah dalam membuat keputusan perencanaan investasi. Sementara, informasi arus kas pemerintah daerah diyakini mampu memberikan informasi untuk membantu para memiliki kepentingan dalam memprediksi arus kas yang akan didistribusikan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Menurut (Sari dkk, 2017) di masa yang akan datang digunakan untuk menutupi belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung dimasa yang akan datang sehingga peranan SILPA berpengaruh besar pada komposisi belanja daerah dimasa yang akan datang. ada penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk (2017) menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

Objek dari penelitian ini yaitu pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Adapun perbedaan objek penelitian ini adalah rentang waktu yang berbeda yaitu Tahun 2014-2016 dan objek penelitiannya di Jawa Tengah. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut : **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA PERIMBANGAN DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) TERHADAP BELANJA MODAL”** (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016).

## **2. METODE**

### **2.1 Populasi dan Sampel**

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang meliputi 35 kabupaten/kota. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah yang melaporkan secara rutin Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014-2016 dan mempublikasikannya

### **2.2 Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, Data dan Sumber Data yang digunakan ialah :

### 2.2.1 Data

Data Sekunder adalah Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002: 58).

### 2.2.2 Sumber Data

Data pada penelitian ini bersumber dari laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016 yang diperoleh dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2005), uji normalitas data dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil telah memenuhi kriteria sebaran atau distribusi normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan dalil yang disebut Central Limited Theorem (CLT). Jumlah sampel penelitian lebih besar dari 30 maka di asumsikan bahwa data dalam penelitian telah terdistribusi dengan normal.

### 3.2 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji Rank Spearman. Hasil uji heterokedastisitas diketahui bahwa:

Tabel 1. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
PAD	0.914	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
DBH	0.218	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
DAU	0.065	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
DAK	0.864	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
SILPA	0.981	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : data diolah 2019.

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 1 Nilai absolut dari residual data yang digunakan dalam hasil regresi, menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian pada persamaan regresi dalam penelitian ini bebas dari masalah heteroskedastisitas karena memiliki nilai probabilitas yang lebih besar dari 0.05.



### 3.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Adapun hasil uji multikolinearitas adalah sebagaimana tercantum dalam table IV.3 yang terdapat dibawah sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Uji Multikolineritas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
PAD	0.287	3.486	Tidak Terjadi Multikolineritas
DBH	0.703	1.423	Tidak Terjadi Multikolineritas
DAU	0.904	1.106	Tidak Terjadi Multikolineritas
DAK	0.908	1.101	Tidak Terjadi Multikolineritas
SILPA	0.254	3.936	Tidak Terjadi Multikolineritas

Sumber : data diolah 2019.

Hasil uji multikolinearitas terlihat pada Tabel 2 dan hanya dilakukan pada persamaan 2b. Nilai *tolerance* lebih dari 0.10 atau *VIF* lebih kecil dari 10, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada persamaan regresi.

### 3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DWtest). Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lain diantara variabel independen. Hasil uji autokorelasi dapat diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 1.515. Nilai Durbin-Watson dari model data berada diantara -2 dan 2, menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada persamaan regresi.

### 3.5 Pembahasan

#### 3.5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi (sig t) variabel PAD sebesar 0.005( $\alpha=0,05$ ). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Siswanto (2012) serta Hermawan (2017) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah secara statistik berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dapat memberi sedikit acuan bahwa Pendapatan Asli Daerah sangat berperan penting dalam pembangunan daerah tersebut. Oleh karena itu daerah hendaknya lebih terpacu lagi untuk memanfaatkan sumber daya daerah untuk dapat digunakan dalam rangka kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dapat memberi keleluasaan kepada daerah tersebut untuk mengalokasikan ke kegiatan atau pengeluaran yang dapat memberi dampak terhadap peningkatan pembangunan daerah terutama pembangunan infrastruktur. Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian (Putro dan Pamudji, 2011). Dari peningkatan produktivitas perekonomian akan memberi dampak positif pada peningkatan pendapatan daerah tersebut.

### 3.5.2 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan oleh signifikansi variabel Dana Bagi Hasil sebesar 0.000 ( $< \alpha = 0,05$ ) yaitu lebih kecil dari 0,05. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) juga Hermawan (2017) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Hasil ini menjelaskan bahwa provinsi yang mendapatkan DBH yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DBH. DBH merupakan dana yang dibagikan dari pemerintah pusat terhadap daerah sesuai dengan presentase dari hasil kekayaan alam yang dikelola dan pajak yang diterima oleh daerah, semakin tinggi hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pajak yang diterima daerah akan lebih tinggi pula dana bagi hasil yang diterima daerah, hal ini menandakan bahwa daerah dengan Dana Bagi Hasil tinggi dapat dikatakan dapat memenuhi kebutuhan sendiri (Hermawan, 2017). Pemerintah daerah akan mampu menetapkan Belanja Modal yang semakin besar jika anggaran DBH semakin besar pula, begitupun

sebaliknya semakin kecil belanja modal yang akan ditetapkan jika DBH semakin kecil (Wandira, 2013). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang diajukan oleh Hermawan (2017) maupun Wandira (2013) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara Dana Bagi hasil dengan Belanja Modal.

#### 3.5.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian, Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai signifikansi sebesar 0.225 ( $>\alpha = 0,05$ ) yang berarti nilai signifikansinya lebih besar dari 0.05. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mentayan dan Rusmanto (2013).

Menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada merupakan fungsi Dana Alokasi Umum. Distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif besar akan memperoleh DAU lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Meskipun demikian, ketergantungan pemerintah daerah terhadap DAU masih tinggi dalam pembiayaan rumah tangganya. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal kota/kabupaten di Jawa Tengah yang disebabkan DAU yang diterima oleh sebagian besar kota/kabupaten di Jawa Tengah dimanfaatkan untuk Belanja Operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan. Hal ini tergambar dari jumlah belanja operasi yang lebih besar dari jumlah Dana Alokasi Umum. Hasil Penelitian ini mendukung penelitian Kusnandar (2012) dan Menez (2013), tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Adiwiyana (2011), Putro (2012) dan Permana (2013).

#### 3.5.4 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi variabel DAK sebesar 0.000 ( $<\alpha = 0.05$ ). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) dan Hermawan (2017) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DAK. Pendapatan daerah yang berupa Dana Perimbangan (transfer daerah) dari pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterahkan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAK) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal.

Penelitian Sebelumnya dilakukan oleh Sianipar (2011) menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil Penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian ini dimana DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardhani (2011), yaitu DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat dikarenakan penggunaan sampel dan periode waktu yang berbeda.

#### 3.5.5 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal

Variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil ini ditunjukkan oleh signifikansi variabel Profitabilitas sebesar 0.059 ( $>\alpha = 0,05$ ) yaitu lebih besar dari 0.05. Hal ini membuktikan bahwa pertimbangan untuk menentukan besarnya belanja modal akan sangat dipengaruhi dalam pembelanjaan anggaran. Semakin tinggi SiLPA maka akan mempengaruhi peningkatan belanja modal.

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, Belanja Modal dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya sampai dengan akhir tahun anggaran yang belum diselesaikan. Sehingga tidak seluruhnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran digunakan untuk belanja modal seutuhnya karena Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat membantu suatu daerah untuk menutupi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya deficit anggaran.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Hermawan (2017) yang didukung oleh Febriana (2015) yang menyatakan bahwa SiLPA tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pengujian secara parsial hasil uji bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah.
- b. Berdasarkan pengujian secara parsial hasil uji bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah.
- c. Berdasarkan pengujian secara parsial hasil bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah.
- d. Berdasarkan pengujian secara parsial hasil uji bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah.
- e. Berdasarkan pengujian secara parsial hasil uji bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah.

##### **4.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Adapun beberapa keterbatasannya, yaitu :

- a. Jumlah data sampel yang hanya menggunakan kabupaten atau kota dalam satu provinsi di Indonesia dalam tiga tahun anggaran, sehingga hasil yang diperoleh kemungkinan tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya dan hasil dari penelitian ini kurang maksimal.
- b. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas pada unsur yang terdapat pada laporan realisasi anggaran.

### 4.3 Saran

Penelitian ini memiliki beberapa saran, adapun beberapa sarannya yaitu :

- a. Perlu adanya peningkatan pengelolaan hasil kekayaan daerah agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Kekayaan alam untuk memenuhi kebutuhan belanja sendiri sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat.
- b. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dengan penelitian yang sama mengambil sampel lebih banyak dari penelitian dan variable independen lain seperti pertumbuhan ekonomi, luas daerah dan lain-lain.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adiwiyana, Priya. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ardhani, Pungky. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah). Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Balitbang Provinsi NTT. 2008. Analisis tentang Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Litbang NTT, IV-03.
- Darwanto & Yulia Yustikasari. 2007. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal". Simposium Nasional Akuntansi X Makasar 26-28 Juli 2007.
- Dwiyantari. Ni Kadek Desi. 2015. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Bali). Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.
- Febriana, Imas Sherli dan Sugeng Praptoyo. 2015. Analisa Faktor – factor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol.4 No.9 2015. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Ghozali, Imam 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

- Ikhlas, Saily, 2011. Dana Alokasi Khusus dalam Pembiayaan Pembangunan.
- Kusnandar & Dodik Siswanto. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Jurnal SNA 15.
- Mardiasmo (2002). "Akuntansi Sektor Publik". Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Menez, Ulva N. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Jumlah Penduduk terhadap Alokasi Belanja Modal. Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Mentayani dan Rusmanto. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal. (Studi Empiris Pada Kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan. Jurnal Investasi Vol.5 No. 2 Desember: Hal 91-102.
- Nuaris, Sheila Ardhian. 2013. Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Accounting Analysis Journal (AAJ) 2 (1) (2013) ISSN 22526765.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Permana, Deva Yoga. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Putro, Nugroho Suratmo & Pamudji, Sugeng. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
- Rudi, Hermawan. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Perimbangan, Sisa Lebih Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2013-2015). Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sianipar, Eva Septriani. 2011. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Belanja Modal. (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara). Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Sugiarti, Ni Putu Dwi Eka Rini, dan Ni Luh Supadmi. 2014. Pengaruh PAD, DAU dan SiLPA dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.2 (2014): 477-495 ISSN: 2302-8556.

Syaiful. 2006. Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintah. Artikel

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Wandira, Arbie Gugus.2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Tahun 2012).

Yovita, Farah Marta. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal. (Studi Empiris Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008-2010). Diponegoro Jurnal Of Accounting Semarang: UNDIP.